

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelabuhan Perikanan

2.1.1 Pengertian Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan dalam bahasa Inggris mempunyai dua pengertian yaitu harbor dan port. Harbour ialah suatu tempat di pinggir laut yang dapat digunakan untuk berlabuh dengan aman bagi kapal-kapal perikanan, karena terlindung dari angin dan laut. Port ialah suatu tempat untuk membongkar, memuat barang/penumpang dari kapal-kapal yang datang yang dikenal sebagai kegiatan maritim dan dikelola oleh otoritas pemerintah. Sedangkan menurut Undang-Undang No.21 Tahun 1992 tentang pelayaran, pengertian pelabuhan perikanan adalah suatu kawasan perpaduan antara daratan dan lautan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang diperlukan bagi penangkapan ikan dan memudahkan keluar masuknya kapal-kapal perikanan. Selain itu pelabuhan perikanan dapat diartikan sebagai suatu paduan dari wilayah perairan, wilayah daratan dan sarana-sarana yang ada dibasis penangkapan dan merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun pemasarannya. Pelabuhan Perikanan memberikan kontribusi untuk meningkatkan produksi ikan, pemasukan devisa, membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, meningkatkan penyediaan ikan segar dan peningkatan pendapatan pemerintah local (Lubis, 2000).

Menurut Agussalim (2005), pelabuhan perikanan adalah mata rantai terpenting yang menghubungkan kegiatan penangkapan ikan dengan penjualan komoditi ikan ke konsumen dengan kata lain, ikan yang merupakan hasil kegiatan usaha penangkapan sebagai barang produksi yang akan sampai ke konsumen sebagai bahan pangan dan sangat dipengaruhi oleh keadaan sarana dan prasarana pelabuhan.

pelabuhan perikanan adalah daratan perairan yang terlindung terhadap gelombang yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut, meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambah untuk bongkar muat barang, gudang laut (transito) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan (Triatmojo, 1996)

Adapun fungsi dari pelabuhan perikanan menurut Direktorat Jenderal Perikanan (1994) berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan dan ekonomi perikanan antara lain tempat berlabuhnya kapal perikanan, tempat pendaratan ikan hasil tangkapan, tempat pendaratan ikan hasil tangkapan, tempat untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kapal perikanan, pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan, pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan, serta pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data.

2.1.2 Definisi dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Tahun 1981, Departemen Pertanian, dan Departemen Perhubungan Tahun 1996, definisi Pelabuhan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Pelabuhan Perikanan adalah pelabuhan secara khusus menampung kegiatan masyarakat perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun aspek pemasarannya.
2. Pelabuhan Perikanan adalah sebagai tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan, sebagai pusat pembinaan, sebagai tempat tambat labuh, bertambat, penanganan pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan.

Sedangkan klasifikasi Pelabuhan Perikanan menurut SK Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 tahun 2004 memiliki empat kriteria tipe pelabuhan perikanan antara lain Pelabuhan Perikanan Tipe A (Pelabuhan Perikanan Samudra), Tipe B (Pelabuhan Perikanan Nusantara), Pelabuhan Perikanan Tipe C (Pelabuhan Perikanan Pantai), Pelabuhan Perikanan Tipe D (Pangkalan Pendaratan Ikan). Adapun penjelasan dari empat kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelabuhan Perikanan Tipe A (Pelabuhan Perikanan Samudera)

Pelabuhan Perikanan tipe ini adalah Pelabuhan Perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan samudera sampai ke perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), kapal perikanan berukuran > 60 GT, menampung 100 buah kapal, jumlah ikan yang didaratkan \pm 200 ton/hari, memberikan pelayanan untuk ekspor dan mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 30 Ha.

2. Pelabuhan Perikanan Tipe B (Pelabuhan Perikanan Nusantara)

Pelabuhan Perikanan tipe ini adalah Pelabuhan Perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan nusantara sampai keperairan laut teritorial, kapal berukuran 15 – 60 GT, menampung 50 - 60 buah kapal, melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan pantai, jumlah ikan yang didaratkan \pm 50 ton/hari, dan mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 5 Ha.

3. Pelabuhan Perikanan Tipe C (Pelabuhan Perikanan Pantai)

Pelabuhan perikanan tipe ini adalah Pelabuhan Perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan pantai sampai kepulauan laut teritorial, kapal berukuran 5 -15 GT, menampung 25 buah kapal, jumlah ikan yang didaratkan \pm 20 ton/hari, dan mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 5 Ha.

4. Pelabuhan Perikanan Tipe D, (Pangkalan Pendaratan Ikan)

Pelabuhan perikanan tipe ini adalah Pelabuhan Perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 GT. menampung 15 buah kapal, melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan pantai, jumlah ikan yang di daratkan \pm 5 ton/hari, dan mempunyai cadangan lahan pengembangan seluas 1 Ha.

2.1.3 Fungsi dan Peranan Pelabuhan Perikanan

Adapun fungsi dari pelabuhan perikanan menurut peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/2006 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan
2. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan
3. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan
4. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan
6. Pelaksanaan kesyahbandaran
7. Pelaksanaan fungsi karantina ikan
8. Pengendalian lingkungan seperti kebersihan, keamanan dan ketertiban.

Sedangkan peranan Pelabuhan Perikanan meliputi menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat kedalam suatu usaha dan berdayaguna tinggi untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya perikanan diharapkan dapat meningkatkan produksi dan pendapatan serta perbaikan sosial kesejahteraan masyarakat nelayan.

2.1.4 Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas pelabuhan perikanan, dimana fasilitas pelabuhan perikanan tersebut dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas tambahan/penunjang.

2.1.4.1 Fasilitas Pokok Pelabuhan Perikanan

Fasilitas pokok pelabuhan perikanan adalah fasilitas yang diperlukan untuk kepentingan aspek keselamatan pelayanan, selain itu termasuk juga tempat berlabuh dan bertambah serta bongkar muat kapal. Fasilitas pokok pelabuhan perikanan terdiri dari :

1. Fasilitas pelindung, meliputi : pemecah gelombang (*break water*), penangkap pasir (*good grains*), turap penahan tanah (*revetment*), serta jetty.
2. Fasilitas tambat, meliputi : dermaga, tiang tambat (*bolder*), pelampung tambat, *bollard* serta *bier*
3. Fasilitas perairan, meliputi : alur dan kolam pelabuhan
4. Fasilitas transportasi, meliputi : jembatan, jalan kompleks, tempat parkir
5. Lahan yang dicadangkan untuk kepentingan instansi pemerintah (Direktorat Jenderal Perikanan, 1994)

2.1.4.2 Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan

Fasilitas fungsional pelabuhan perikanan adalah fasilitas yang secara langsung dimanfaatkan untuk kepentingan manajemen pelabuhan perikanan dan/ yang dapat diusahakan oleh perorangan/badan hukum. Fasilitas fungsional terdiri dari fasilitas yang dapat diusahakan dan fasilitas yang tidak dapat diusahakan, masing-masing memiliki kriteria sendiri-sendiri.

Adapun hal-hal yang masuk dalam kategori fasilitas fungsional yang dapat diusahakan yaitu :

1. Fasilitas pemeliharaan kapal dan alat perikanan terdiri dari bengkel, slipway / dock dan tempat penjemuran jaring

2. Lahan untuk kawasan industri
3. Fasilitas pemasok air dan bahan bakar untuk kapal dan keperluan pengolahan fasilitas pemasaran, penanganan hasil tangkapan, pengawetan dan pengolahan, tempat pelelangan ikan, tempat penjualan hasil perikanan, gudang penyimpanan asli olahan, pabrik es, sarana pembekuan, *cold strage*, peralatan *processing*, *derek/crane*, lapangan penumpukan

Sedangkan fasilitas fungsional yang tidak dapat diusahakan meliputi :

1. Fasilitas navigasi : alat bantu navigasi, rambu-rambu dan suar
2. Fasilitas komunikasi : stasiun komunikasi serta peralatannya.

2.1.4.3 Fasilitas Penunjang Pelabuhan Perikanan

Fasilitas penunjang/tambahan pelabuhan perikanan adalah fasilitas yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat umum. Fasilitas penunjang tersebut terdiri dari :

1. Fasilitas kesejahteraan nelayan terdiri dari : tempat penginepan, kios bahan perbekalan dan alat perikanan, tempat ibadah serta balai pertemuan nelayan
2. Fasilitas pengelolaan pelabuhan terdiri dari : kantor, pos penjagaan, perumahan karyawan, mess operator
3. Fasilitas pengelolaan limbah bahan bakar dari kapal dan limbah industri
(Direktorat Jenderal Perikanan, 1994)

2.2 Manajemen Strategi

2.2.1 Pengertian Manajemen Strategi

Menurut Hayes dan Weel Wright strategi adalah segala sesuatu terjadi yang memunculkan suatu reaksi sosial dalam lingkup perusahaan salah satu adalah pengalokasian sumberdaya perusahaan. Freddy Rangkuti, (2000 : 56) Sedangkan menurut Nawawi, (2003) Manajemen Strategi merupakan proses rangkaian pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh disertai penetapan cara melaksanakan oleh manajemen dan ditetapkan seluruh jajaran dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Manajemen Strategi

Manajemen Strategi Menurut Wahyudi, (1996) adalah seni atau ilmu dari pembuatan, penerapan, dan evaluasi tentang keputusan-keputusan strategis dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan mendatang.

Adapun prinsip-prinsip manajemen strategi adalah sebagai berikut :

1. *Strategy formulation* adalah menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
2. *Strategy Implementation* adalah mengimplementasikan strategi kedalam berbagai alokasi sumberdaya secara optimal.
3. *Strategy Evaluation* adalah pengukuran kinerja dan penciptaan mekanisme umpan balik.

2.2.3 Perumusan Strategi

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang manajemen agar selalu efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan seperti dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan tersebut. Adapun perumusan strategi seperti perumusan misi, perumusan visi dan perumusan nilai-nilai.

Prof. Dr. Akdon, M.pd (2011) menyatakan bahwa *Mission statement are enduring statement of purpose that distinguish one business from other similar firm. A mission statement identifies the scope of a firm operations in product and*

market term. It addresses the basic question that faces all strategies. Pernyataan misi diatas memperlihatkan tugas utama yang harus dilakukan suatu lembaga instansi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki tentang pekerjaan atau tugas pokok agar diharapkan dapat terwujud. Sedangkan perumusan visi merupakan gambaran tentang masa depan yang nyata yang ingin diwujudkan sehingga mampu memberikan gambaran pandangan masa depan. Dalam hal tersebut sebagaimana ditulis dalam Encyclopedia Americana, (1976) Perumusan nilai-nilai adalah kriteria tentang kebaikan dan kebenaran yang diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi norma yang diyakini dalam kehidupan individu.

2.2.4 Aplikasi Manajemen Strategi di Indonesia

Berdasarkan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, kemudian disusul dengan Nomor 28 Tahun 1999, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/YY/99 tentang Aplikasi Manajemen Strategi di Indonesia.

Aplikasi Manajemen Strategi di Indonesia terdiri dari komponen-komponen seperti perencanaan strategi, perencanaan kinerja, pengukuran evaluasi kinerja. Dari komponen-komponen tersebut akan dijelaskan perencanaan strategi yang bersifat konseptual meliputi komponen-komponen perencanaan strategi seperti visi, misi, tujuan dan sasaran. Sedangkan perencanaan kinerja adalah rencana kinerja tahunan dengan menunjukkan indikator kinerja yang relevan. Pengukuran dan evaluasi kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

2.3 Pengembangan Pelabuhan Perikanan

Pengembangan Pelabuhan Perikanan adalah suatu pengembangan yang ada pada di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Sesuai dengan fungsi-fungsi yang dimiliki pola pengembangan pelabuhan perikanan harus dilakukan berdasarkan konsepsi "*multi-base system*" yaitu suatu sistem yang menyeluruh berdasarkan pengembangan wilayah yang dalam operasionalnya akan mencakup berbagai aspek produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sampai pada aspek sosial-ekonomi perikanan (Elfandi 2000, diacu dalam Kurniawan 2001). Sehubungan dengan hal ini maka pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan sebagai pengembangan komunitas perikanan (Fisheries community development) secara terpadu (Direktorat Jenderal Perikanan, 1998 dalam Kurniawan 2001) antara lain Pengembangan Pelabuhan Perikanan dengan segala sarana dan prasarana untuk meningkatkan usaha kegiatan perikanan (produksi, pengolahan dan distribusi hasil perikanan), Pengembangan Masyarakat Nelayan dengan penyediaan fasilitas untuk kegiatan operasional dan pembangunan perkampungan nelayan untuk rumah tangga nelayan, Pembinaan Sumberdaya Manusia Perikanan melalui peningkatan ketrampilan dan profesionalisme dengan program-program pelatihan maupun manajemen secara terarah.

Untuk melakukan pengembangan Pelabuhan Perikanan diatas maka harus dilakukan secara terencana dan terpadu dengan menganalisis komponen-komponen *tryptique portuaire* yang saling berkaitan dengan komponen-komponen tersebut yaitu *Foreland* adalah suatu komponen yang terdiri dari parameter-parameter yang berkaitan dengan potensi sumberdaya ikan, daerah penangkapan dan lingkungan perairan maka dapat pula dikatakan daerah produksi, *Fishing port* merupakan komponen yang meliputi kondisi fisik existing, potensi perikanan (produksi, nilai produksi, unit penangkapan) dan organisasi

yang ada di dalamnya, *Hinterland* merupakan salah satu komponen penting dalam analisis karena komponen itu meliputi konsumen/distribusi, sarana prasarana pendukung, lembaga dan organisasi yang mendukung aktivitas pendistribusian dan lain-lain.

Dengan demikian pengembangan Pelabuhan Perikanan di suatu wilayah disamping memperhatikan kebutuhan pengembangan Pelabuhan Perikanan itu sendiri melalui pendekatan *tryptique portuaire* juga harus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah daerah dapat berupa program-program kerja daerah kedepan maupun peraturan-peraturan (Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat).

